

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku :

- Arief, Barda Nawawi, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Edisi Revisi*, Citra Aditya Bakti, Semarang.
- Atmasasmita, Romli, 1982, *Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Chazawi, Adami 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Effendi, Tolib, 2015, *Prinsip Oportunitas dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, dalam Buku Bunga Rampai Kejaksaan Republik Indonesia*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Effendy, Marwan, 2010, *Sistem Peradilan Pidana (Tinjauan terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana)*, GP. Press Group, Jakarta.
- Fajar, Rahmat, 2010, *Bahaya Merokok*, Sarana Bangun Pustaka, Jakarta.
- Farid, Zinal Abidin, 1995, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika.
- Harahap, M.Yahya, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jilid I dan II, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, M.Yahya, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hiariej, Eddy O.S, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Husein, Harum M, 1991, *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*, Renaka Cipta, Jakarta.

- Juwono, Hikmahanto, 2006, *Penegakan Hukum dalam Kajian Law and Development : Problem dan Fundamen Bagi Solusi di Indonesia*, Varia Peradilan Nomor244, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F, 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti Bandung.
- Marpaung, Laden, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Angkasa, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- , 2010, *Terori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Muladi, 2006, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Nazir, Moh., 1998, *Metode Penelitian*, Ghalia, Jakarta.
- Prakoso, Djoko, 1980, *Polri Sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*, Bina Aksara, Jakarta.
- Prasetyo Teguh, 2010, *Hukum pidana (edisi revisi)*, Jakarta, Rajagrafindo Persada
- Renggong, Ruslan, 2016, *Hukum Pidana Khusus*, Kencana, Jakarta.
- Santoso, Topo, (tidak ada tahun terbit), *Hukum Pidana Materiil dan Formil*, USAid Kemitraan The Asia Foundation, (tidak ada tempat terbit).
- Satria Hariman, 2004, *Anatomi Hukum Pidana Khusus*, Yogyakarta, UII Press.
- Simanjuntak, Nikolas, 2009, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Simonagkir, J.C.T., dkk., 1980, *Kamus Hukum*, Jakarta, Aksara Baru.
- Soekanto, Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI -Press), Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2002, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Sofyan Andi, 2014, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Kencana.

Sudarto, 1960, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Sukinto, Yudi Wibowo, 2015, *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta..

Sunggono, Bambang, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Surono, 2014, *Teknis Cukai 1*, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Jakarta.

Sutedi, Adrian, 2012, *Aspek Hukum Kepabeanan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Garafika, Jakarta.

## **2. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata acara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan Pada Kemasan Produk Tembakau.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 188 /Pmk.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai

Keputusan Menteri Keuangan Nomor. 92 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Bidang Kepabeanan dan Cukai

Surat Jaksa Agung Republik Indonesia kepada Kepala Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia Nomor : B – 1121/ F.2/ Ft.2/06/2009 tanggal 14 Januari 2009, perihal Petunjuk Pada Tahap Pra- Penuntutan Penanganan Perkara Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai;

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan Dan Pembinaan Penyidikanbagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor 53 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengawasan

Kep. Dirjen Bea dan Cukai Nomor 57 tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Penyidikan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

### **3. Artikel Jurnal**

Aditya, Ivan, “Bea Cukai Magelang Musnahkan Rokok Ilegal dan Liquid Vape”, Diakses melalui <https://krjogja.com/berita-lokal/jateng/kebu/bea-cukai-magelang-musnahkan-rokok-ilegal-dan-liquid-vape/>, diakses pada tanggal 1 Januari 2020.

Al, Yugi, “Batas Wilayah Negara Indonesia”, diakses melalui <https://www.eduspensa.id/batas-wilayah-negara-indonesia/>, diakses pada tanggal 12 Desember 2019.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, Produksi Tanaman Perkebunan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Tanaman di Provinsi Jawa Tengah (ton), 2018 – akhir 2019 diakses melalui <https://jateng.bps.go.id/statistictable/2019/10/16/1768/produksi-tanaman-perkebunan-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-tanaman-di-provinsi-jawa-tengah-ton-2018.html>, diakses pada tanggal 5 Mei 2020.

Candra, Sapta, “Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”, diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/37183-ID-perumusan-ketentuan-pidana-dalam-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia.pdf>, pada tanggal 12 September 2020.

Databoks.Katadata.co.id., “Tren Kenaikan Cukai Rokok 2009-2020”, diakses melalui <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/16/tren-kenaikan-cukai-rokok-2020>, diakses pada tanggal 11 September 2020.

Hananto, Akhyari, “Dikukuhkan di New York Agustus ini, Inilah Jumlah Resmi Pulau di Indonesia”, diakses melalui <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2017/08/19/dikukuhkan-di-new-york%20-agustus-ini-inilah-jumlah-resmi-pulau-di-indonesia>, diakses tanggal 12 Desember 2019.

Hargo, Dody Usodo, Jumlah Pulau di Indonesia, <https://dkn.go.id/ruang-opini/9/jumlah-pulau-di-indonesia.html>, diakses tanggal 12 Desember 2019.

Hukum Online.com, “PT Pernah Minta PN Mempelajari Kompetensi Relatif Kasus Nurdin Halid”, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol13103/pt-pernah-minta-pn-mempelajari-kompetensi-relatif-kasus-nurdin-halid/>, diakses pada tanggal 14 September 2020.

Hukum Online.com, “Putusan Sela” diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl2772/putusan-sela/>, diakses pada tanggal 18 Agustus 2020.

Kemenkue Learning Center, “Identifikasi Pita Cukai”, diakses melalui <https://klc.kemenkeu.go.id/identifikasi-pita-cukai/>, diakses tanggal 28 Juli 2020.

Kemenkue LERANING Center, “Cara Awam Mengecek Rokok Ilegal”, diakses melalui <https://klc.kemenkeu.go.id/pusbc-cara-awam-mengetahui-rokok-ilegal/>, diakses pada tanggal 27 Juli 2020.

Kementrian Keangan DJBC, Profil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diakses melalui <https://www.beacukai.go.id/arsip/abt/video-profil-direktorat-jenderal-bea-dan-cukai.html>, diakses pada tanggal 29 Juli 2020.

Kementrian Kuangan Direktorat Jendral Bea Dan Cukai, “Bea Cukai Magelang Musnahkan Ratusan Ribu Batang Rokok Ilegal Senilai Ratusan Juta Rupiah”, diakses melalui <http://www.beacukai.go.id/berita/bea-cukai-magelang-musnahkan-ratusan-ribu-batang-rokok-ilegal-senilai-ratusan-juta-rupiah.html>, diakses pada tanggal 7 Januari 2020.

KPAI, Menyelamatkan Anak Dari Bahaya Rokok, diakses melalui <https://www.kpai.go.id/tinjauan/menyelamatkan-anak-dari-bahaya-rokok>, diakses pada tanggal 9 Januari 2020.

Medcom.id, “Kenaikan Cukai Rokok Bisa Menimbulkan Rokok Ilegal,” diakses melalui <https://www.medcom.id/ekonomi/makro/8Ky5mOzK-kenaikan-cukai-rokok-bisa-menimbulkan-rokok-ilegal>, diakses pada tanggal 11 September 2020.

Okezone.com., “5 (lima) Kategori Pelanggaran Cukai Rokok Ilegal” diakses melalui <https://economy.okezone.com/read/2012/09/26/20/695454/5-kategori-pelanggaran-cukai-rokok-ilegal>, diakses pada tanggal 9 September 2020.

Pelafu, Fiona, “Pelaksanaan Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”, Lex Crimen Vol. VI/No. 3/Mei/2017.

Roziki, Yayan isro, “Kejari Temanggung Terima Limpahan Kasus Rokok Ilegal, Barang Bukti Capai 960 Ribu Batang”, diakses melalui <https://jateng.tribunnews.com/2019/10/18/kejari-temanggung-terima-limpahan-kasus-rokok-ilegal-barang-bukti-capai-960-ribu-batang>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2019.

Slamet, Kusnu Goesniadhio, 2004, Harmonisasi Hukum dalam Perspektif Perundangundangan, Jurnal Hukum, Vol. 11, Yogyakarta: FH UII, hlm. 86.

Suyitno, Heru Ribuan Keranjang Tembakau Belum Diserap Pabrik Rokok, diakses melalui <https://jateng.antaranews.com/berita/>

131469/ribuan -keranjang-tembakau-belum- diserap –pabrik rokok, diakses pada tanggal 5 Mei 2020.

Ulya, Fika Nurul, “Rokok Ilegal Menjadi Kasus Terbanyak yang Ditangani Bea Cukai”, diakses melalui <https://money.kompas.com/komentar/2019/11/14/101500626/rokok-ilegal-menjadi-kasus-terbanyak-yang-ditangani-bea-cukai>, diakses pada tanggal 14 November 2019.

Warta Bea Cukai, “Menelisik Aturan Pabean Pada Era E-Commerce” Vol. 50, Nomor 3, 1 Maret 2018.

Yohanes R. Sri Agoeng Hardjito, dkk., “Implikasi Undang-Undang Cukai Terhadapketaatan Pengusaha Pabrik Rokok Dalam Membayar Cukai (Studi Di Kantor Pengawasan Danpelayanan Bea Dan Cukai Tipe A2 Kudus)”, diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/109700-ID-none.pdf>, diakses pada tanggal 9 September 2020.

#### **4. Hasil Penelitian / Tugas Akhir**

Anugerah, Listakeri Syafriliana, 2018, Eksistensi Pidana Mati Menurut Perspektif Masyarakat, *Skripsi*, Universitas Gadjah Mada.

Cantika Anggi, 2014, Karakteristik Perokok Pada Mahasiswa Fakultas Kedokteran USU, *Skripsi*, Universitas Sumatera Utara.

Mahfudloh, Riza, 2017, Pengendalian dan Penegakan Hukum terhadap Peredaran Rokok Ilegal dan Pita Cukai Palsu oleh Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai dan Dinas Instansi Terkait Kota Surakarta, *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Nindia, Annisa, 2019, Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Jawa Barat dalam Penyidikan Tindak Pidana Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol, *Skripsi*, Universitas Gadjah Mada.

Ramadhan, Calvin, 2017, Koordinasi Antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea Dan Cukai dengan Penyidik Polri dalam Penanggulangan Tindak Pidana Ekspor Ilegal Pasir Timah, *Skripsi*, Universitas Lampung.

Sulistyanigrum, Yuliana, 2018, Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Koordinasi Antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dengan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

